



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Ribuan sekolah rusak akibat bencana Sumatera: perlukan ditetapkan status darurat pendidikan?
Tanggal	: Jumat, 05 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Ribuan Sekolah Rusak Akibat Bencana Sumatera

Perlukah Ditetapkan Status Darurat Pendidikan?

Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat tidak hanya memporak parandonakan ribuan rumah warga, tetapi juga ribuan sekolahnya.

Berdasarkan data sementara dari Kemendikdasmen per Minggu (30/11), sekolah terdampak bencana sebanyak 1.000 sekolah di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang berjumlah 310. Sumut berjumlah 385, dan Sumbar berjumlah 314.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan pihaknya sudah meluncurkan tim untuk melakukan mitigasi dan pemetaan. Pihaknya memastikan kegiatan belajar-

mengajar bagi para siswa di daerah yang terdampak banjir dapat tetap berjalan.

"Kami sudah melakukan mitigasi dan melakukan pemetaan, tidak hanya Aceh dan Sumatra Utara,

tetapi juga di beberapa tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah,"

ujar Abdul Mu'ti dalam keterangan resmi Senin (1/12/2025).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan pihaknya sudah

meluncurkan tim untuk melakukan mitigasi dan pemetaan. Pihaknya memastikan kegiatan belajar-

rusak, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mendesak agar ditetapkan status darurat pendidikan.

Ia mengatakan kerusakan

infrastruktur pendidikan sangat parah, APBD daerah jelas tidak akan mampu menanggungnya sendirian.

Namun, tanpa status bencana nasional atau status darurat pendidikan, pemerintah pusat, mekanisme pendanaan dan logistik darurat dari pusat sangat minim dan terhambat.

"Akibatnya, proses di lapangan jalan di tempat," tegasnya.

Saat ini, sekolah masih terdampak atau rusak parah. Banyak bangunan

sekolah masih dipenuhi lumpur, rusak struktural, bahan hilang karena terbawa arus. Proses pembenihan dan perbaikan awal sangat minim dan mengandalkan swadaya masyarakat serta relawan. "Sudah satu pekan, tapi pembenihan sekolah masih banyak yang dilakukan manual oleh warga dan guru karena belum ada dukungan logistik yang memadai," ujarnya.

Situsasi ekonomi keluarga yang hancur pasca banjir berpotensi besar memaksa anak-anak putus sekolah karena masalah biaya.

Di samping itu, alasan putus sekolah juga karena membangun sekolah rusak berat butuh waktu yang panjang. Hingga

kini pemerintah belum mengeluarkan

skema perlindungan sosial khusus untuk mencegah hal ini. "Jika tidak ada intervensi cepat, kita akan menghadapi generasi hilang. Anak-anak bisa terhenti pendidikannya bukan hanya karena banjir, tetapi karena kelambanan negara," tegas Ubaid.

Bagaimana respons DPR atas desakan adanya darurat pendidikan? Ketua Komisi X DPR, Sjafjudin menyatakan adanya desakan tersebut. Ke depan, DPR akan menyampaikan kepada Pemerintah.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Hetifah Sjafjudin dan Ubaid Matraji terkait desakan adanya status darurat pendidikan.

UBAID MATRAJI, Kornas JPPI

Kami Usulkan Segera Tetapkan Status Darurat



Anda mendesak agar Pemerintah mengeluarkan status darurat pendidikan. Kenapa?

Anda mendesak agar Pemerintah mengeluarkan status darurat pendidikan karena bencana banjir yang terjadi di Sumatera Barat dan Aceh. Banyak sekolah rusak parah dan tidak dapat dipulihkan.

Percepat penyelidikan dan tanggungjawab.

Percepat penyelidikan